

# **OPOSISI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI: ARTI PENTING KEBERADAAN OPOSISI SEBAGAI BAGIAN PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

**Firman Noor**

*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

*E-mail: firman.noor@yahoo.co.id*

Diterima: 15-4-2016

Direvisi: 26-4-2016

Disetujui: 28-4-2016

## **ABSTRACT**

*In real politics, the acknowledgement and implementation of democracy would be in vain if the government in daily basis is actually run without any effective controls or balancer from the opposition. Such a government is actually close to the oligarchy or authoritarian government. Indonesia as a country that believes in democracy up until today still has not been able to develop a strong opposition. In this regards, this article aims to discuss the relationship between democracy and opposition. Some specific issues would also be discussed namely, (1) the essence of opposition in democratic framework, (2) the opposition in Indonesian politics and why it is important for democracy strengthening, (3) some aspects that should be performed in order to solidify opposition in political life.*

**Keywords:** *Democracy, opposition, oligarchy, people sovereignty, control*

## **ABSTRAK**

Dalam realitas politik, pengakuan dan pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa pengimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi. Pemerintah sedemikian sesungguhnya lebih dekat dengan sebetulnya pemerintahan oligarkis atau otoriter ketimbang pemerintahan demokratis. Indonesia, sebagai sebuah negara yang mengakui demokrasi, hingga kini belum dapat dikatakan sebagai negara yang berhasil dalam menumbuhkan oposisi yang kuat. Sehubungan dengan hal itu, artikel ini akan membahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan hakikat oposisi dalam kehidupan demokrasi. Secara lebih spesifik, artikel ini akan membahas (1) hakikat oposisi dalam kerangka demokrasi, (2) oposisi dalam realitas politik di Indonesia dan mengapa hal itu menjadi penting untuk penguatan demokrasi, (3) beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk menumbuhkan oposisi dalam kehidupan politik bangsa.

**Kata kunci:** Demokrasi, oposisi, oligarki, kedaulatan rakyat, kontrol

## **PENDAHULUAN**

“Democracy is an ideology of opposition as much as it is one of government.”

(Ian Shapiro, 1996, 51)

Kajian beberapa Indonesianis belakangan ini menunjukkan bahwa praktik oligarki (Robison & Hadiz, 2004, 2014; Winters, 2011, 2014) atau elitisme (Tornquist, 2006; Buehler, 2014) di Indonesia masih menampakkan gelagatnya dan terus berjalan meski kehidupan politik Indonesia diyakini telah jauh lebih demokratis.

Amatan para pemerhati politik Indonesia kontemporer itu pada umumnya mengisyaratkan sebuah paradoks bahwa Indonesia adalah contoh *par excellent* dari fenomena ketika mekanisme demokrasi dan eksistensi oligarki atau elitisme dapat saling mengisi atau hidup berdampingan pada saat bersamaan (Ford & Pepinsky, 2014, 2). Sementara itu, khusus dalam soal hubungan eksekutif dan legislatif, pola yang terbangun juga belum menunjukkan sebetulnya demokrasi yang solid. Pola hubungan yang terjadi justru mengindikasikan kecenderungan relasi kartel politik,

yakni di antara kedua lembaga itu cenderung bersikap saling menguntungkan, baik terselubung maupun manifes, yang pada akhirnya menyebabkan kontrol terhadap kekuasaan tidak berjalan efektif (Ambardi, 2009; Rodan & Jayasurya, 2009; Mietzner, 2013). Fenomena ini tampaknya sejalan dengan apa yang disebut oleh O'Donnell (1996) sebagai “*delegative democracy*”<sup>1</sup>, yaitu demokrasi hidup di tengah lemahnya pelaksanaan *checks and balances*.

Berbagai simpulan atau pandangan di atas mengindikasikan dengan jelas bahwa eksistensi dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia masih jauh dari sempurna karena masih memberikan tempat yang cukup lapang bagi munculnya praktik politik yang mereduksi hakikat demokrasi itu sendiri. Pandangan para Indonesianis tentang masih cukup kuatnya keberadaan oligarki atau elitisme, di sisi lain, menunjukkan dengan jelas bahwa fenomena pelaksanaan kekuasaan (*power exercise*) hingga kini sesungguhnya masih minim kontrol karena kekuatan penyeimbang (*balancer*) yang memadai belum cukup kokoh. Dalam situasi seperti ini, penguatan eksistensi kekuatan penyeimbang—yang notabene melekat pada kelompok oposisi—menjadi perlu lebih diperhatikan dan secara fundamental merupakan kebutuhan mendesak, setidaknya untuk mengurangi praktik oligarki dengan segenap aspek buruk yang ditimbulkannya.

Sehubungan dengan kebutuhan atas keberadaan oposisi tersebut, yang dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, tulisan ini membahas rasionalitas keberadaan oposisi. Pembahasan artikel ini secara garis besar ditujukan untuk menunjukkan bahwa oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi (Dahl, 1971). Oleh sebab itu, pembenahan demokrasi tidak akan berjalan sempurna—terutama dalam memberikan efek positif yang kuat bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sebetuk pemerintahan yang terkon-

<sup>1</sup> Sebetuk demokrasi yang memungkinkan penguasa terpilih dianggap telah mewakili kepentingan seluruh “delegasi” (yang berperan sebagai wakil dari rakyat), dan oleh karena itu dapat melakukan apa pun yang dianggap penting tanpa harus memerhatikan dengan sangat aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pemerintahan semacam itu secara substansi dekat dengan apa yang disebut oleh Thomas Hobbes sebagai Leviathan.

trol—manakala pembenahan mengenai cara pandang dan kedudukan oposisi tidak diikutsertakan di dalamnya. Sejalan dengan maksud tersebut, artikel ini akan membahas persoalan lainnya, yakni fungsi oposisi yang sesungguhnya, realitas oposisi dalam sejarah kehidupan politik nasional, dan upaya-upaya untuk menumbuhkannya dalam konteks Indonesia kontemporer.

Pembahasan mengenai oposisi di Indonesia tentu bukan persoalan baru. Studi Kroef (1977) dan Uhlin (1998), misalnya, telah membahas oposisi dengan cukup mendalam. Meski demikian, kajian keduanya lebih pada masa sebelum dan menjelang era reformasi. Kajian kekinian atau setidaknya yang berkaitan dengan pemerintahan saat ini belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, artikel ini merupakan bagian upaya dari menengahkan kajian mengenai oposisi dan juga terutama apa yang harus dilakukan di kemudian hari.

## OPOSISI DALAM KERANGKA DEMOKRASI

Membahas arti penting oposisi dalam pembenahan demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dari kerangka berpikir demokrasi itu sendiri. Pembahasan berikut ini akan melihat akar-akar oposisi dalam sudut pandang demokrasi dan melihat fungsi oposisi dalam aspek normatifnya.

### a. Demokrasi sebagai Akar Keberadaan Oposisi

Demokrasi dalam tatanan konseptual memiliki beragam aliran dan sudut pandang. Setidaknya ada dua sudut pandang utama dalam membahas demokrasi. Pertama adalah yang berfokus pada pendekatan kepemiluan atau kerap disebut minimalis. Pendekatan ini memfokuskan diri pada persoalan pemilihan umum (*election*) sebagai inti dari demokrasi. Bagi pandangan ini, kehidupan demokrasi tak lain adalah persoalan bagaimana berhasil dalam pelaksanaan pemilu serta ketika pejabat dan kehidupan bernegara pada akhirnya ditentukan oleh pemilu. Pandangan ini terutama diusung oleh para teoretikus demokrasi, seperti Schumpeter (1975) dan Przeworski (1991).

Pandangan kedua adalah yang melihat secara lebih maksimal, memosisikan demokrasi lebih dari sekadar pelaksanaan pemilu. Dalam sudut

pandangan ini, demokrasi tidak semata dilihat sebagai persoalan pemilihan umum, tetapi sebuah budaya serta ideologi yang memuat seperangkat nilai yang harus disemaikan, seperti persamaan, partisipasi, kebebasan, toleransi, keadilan, hak-hak universal, dan kesepakatan banyak orang. Bagi Dahl (1971, 3), misalnya, keberadaan partisipasi dan koreksi terhadap pemerintahan jauh lebih utama ketimbang pemilu. Sementara bagi yang lain, hakikat demokrasi terletak pada penumbuhan tradisi atau budaya demokratis yang menumbuhkan kesadaran dan upaya untuk mewujudkannya secara sistematis dan substantif. Sehubungan dengan hal ini, kajian dalam ranah maksimalis meliputi kajian yang bernaung, terutama dalam payung *liberal democracy*<sup>2</sup> ataupun *hybrid democracy*<sup>3</sup> serta meliputi kajian seperti *poliarchy*<sup>4</sup>, *deliberative democracy*<sup>5</sup>, *deepening*

<sup>2</sup> Demokrasi liberal adalah sebetulnya demokrasi yang menekankan aspek hak-hak individu (*individual rights*), terutama kebebasan (*freedom*), hak untuk memiliki sesuatu (*property rights*), kebebasan berkehendak serta kemerdekaan untuk mengekspresikan dan mengusahakan kepentingan politiknya seluas-luasnya. Demokrasi liberal juga menganut prinsip pembatasan peran negara, yakni negara yang terbaik adalah seperti negara penjaga malam, yang keberadaannya terlihat pada aturan-aturan main, yang juga secara prinsip tidak mengekang prinsip-prinsip kebebasan individual. Bagi penganutnya, berbicara demokrasi adalah berbicara mengenai nilai-nilai itu dan bagaimana nilai-nilai dapat tumbuh dan berkembang.

<sup>3</sup> Adalah sebuah aliran dalam konsepsi demokrasi yang bersifat "realis", yang meyakini terbukanya kemungkinan adanya nuansa campuran antara praktik demokrasi dan nondemokrasi di sebuah negara. Hal ini berangkat dari realitas bahwa demokrasi dalam praktiknya di banyak negara berkembang tidak selamanya berhasil membuka keran kebebasan atau benar-benar memfasilitasi kedaulatan rakyat. Kekuatan lama yang masih bercokol atau aspek budaya tradisional yang masih kuat memungkinkan bagi terbangunnya demokrasi yang juga masih membuka peluang bagi praktik-praktik politik dan pemerintahan yang bernuansa otoritarian atau bahkan militerisme pada saat bersamaan.

<sup>4</sup> Sebetulnya konsep demokrasi yang dikembangkan oleh Robert Dahl, yang meyakini bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah persoalan yang terkait dengan partisipasi dan oposisi dalam pemerintahan, dan bukan semata persoalan pemilu.

<sup>5</sup> Substansi dari *deliberative democracy* adalah mengondisikan sebetulnya demokrasi yang memungkinkan pemerintahan dapat lebih bekerja sesuai dengan aspirasi masyarakat pasca-pemilu. Di sini, masyarakat memiliki hak dan peluang lebih besar untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terpilih. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa adanya pemilu tidak serta-merta dapat mengawal aspirasi masyarakat, malah

*democracy*<sup>6</sup>, dan *communicative democracy*<sup>7</sup>, merupakan beberapa kajian dalam perspektif substansial ini (Held, 1960; Mayo, 1991; Diamond & Morlino, 2004; Gutmann & Thompson, 2004; Young, 2002; Roberts, 1999).

Hal yang menarik adalah kedua sudut pandang tersebut, terutama sudut pandang yang kedua, sama-sama menempatkan persoalan kedaulatan rakyat sebagai hal yang utama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan teori-teori demokrasi kekinian sama sekali tidak meninggalkan makna normatif demokrasi yang telah dikedepankan sejak zaman Yunani Kuno dulu. Tepat jika demokrasi dipandang sebagai persoalan pengelolaan kedaulatan rakyat, sebagaimana yang dengan tepat dikatakan oleh

di banyak kasus masyarakat ditinggalkan setelah pemilu berlangsung. Dalam skema pemerintahan deliberatif ini, terbuka peluang bagi masyarakat untuk membangun simpul-simpul penyalur kepentingan yang dapat langsung berhubungan dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah tanpa melalui lembaga-lembaga formal demokrasi yang selama ini telah dikenal luas, seperti partai politik atau parlemen. Bahkan dimungkinkan pula simpul-simpul itu dapat turut langsung diikutsertakan dalam proses penentuan distribusi anggaran.

<sup>6</sup> *Deepening democracy* ialah sebuah konsep yang meyakini bahwa pemilu merupakan hal penting dalam demokrasi. Sebuah negara dapat sukses menjalankan demokrasi manakala pemilu dijalankan dengan benar. Artinya, melalui institusi yang kredibel, aturan main yang adil, dan pelaksana yang mumpuni. Oleh karena itu, persoalan demokrasi yang paling pokok adalah bagaimana mengondisikan seluruh aspek dalam masyarakat agar pemilu dapat berjalan dengan semestinya. Dalam makna mengondisikan ini, demokrasi juga pada akhirnya menyetujui persoalan yang terkait dengan hal-hal seperti pemberantasan korupsi, menciptakan pemerintahan yang baik, membangun dan melembagakan institusi-institusi demokrasi, melindungi hak-hak minoritas, pelayanan yang memadai tanpa diskriminasi kepada semua kalangan, serta penumbuhan nilai-nilai demokratis dalam masyarakat.

<sup>7</sup> Demokrasi yang menitikberatkan pada aspek komunikasi sebagai sarana untuk membuka pemahaman yang lebih mendalam, baik di antara masyarakat maupun—dan terutama—antara masyarakat dan pemerintah. Dengan pengedepanan aspek komunikasi yang komprehensif, diharapkan segala kecurigaan, *prejudice*, ataupun hal-hal yang bersifat stereotipe dapat terjembatani, bahkan dihapuskan. Demokrasi semacam ini berpotensi pada masyarakat komunikatif, ketika jalinan komunikasi di antara mereka telah berjalan dengan efektif sehingga masing-masing pihak ataupun mereka yang berkepentingan dapat saling memahami atau pada level pemahaman yang sama. Dalam konteks politik, kesamaan kepentingan dan aspirasi ini akan menyebabkan pemerintahan demokratis berjalan dengan lebih efektif, di mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan jauh lebih relevan.

Abraham Lincoln, yakni tidak lain adalah pemerintahan yang dikelola dari (*of*), oleh (*by*), dan untuk (*for*) rakyat. Lebih dari itu, kajian-kajian demokrasi kekinian juga menempatkan persoalan seputar pertanggungjawaban pemerintah, kekuasaan yang terbatas, partisipasi publik, dan pembagian kekuasaan sebagai hal yang utama.

Sehubungan dengan kedaulatan rakyat tersebut, oposisi menemukan relevansinya. Hal ini mengingat tidak ada jaminan jika kedaulatan rakyat dapat seluruhnya tertampung dan diterjemahkan seutuhnya oleh pemerintah. Sejarah memperlihatkan bahwa tidak jarang pemerintahan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat dalam praktiknya justru menjauhi hakikat kedaulatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, perlu kekuatan di luar pemerintahan yang dapat turut menjaga bahwa kedaulatan rakyat itu tetap ada dan berfungsi. Dalam konteks inilah peran mereka yang berada di luar pemerintahan atau oposisi menjadi penting adanya, terutama untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap berada dalam rel kepentingan rakyat. Dengan kata lain, eksistensi oposisi terkait erat dengan kepentingan menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Selain persoalan kedaulatan rakyat, akar demokrasi yang lain bagi keberadaan oposisi adalah partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai prasyarat bagi eksistensi demokrasi (Pateman, 1970) yang dimaksudkan tentu saja bukan partisipasi yang dimobilisasi, melainkan yang independen atas dasar kesadaran individual. Partisipasi semacam ini membuka peluang bagi setiap warga negara untuk berperan sesuai dengan kesadarannya. Peluang dari kebebasan berpartisipasi ini pada akhirnya memberikan jalan bagi munculnya perbedaan sikap dan pandangan, termasuk terhadap penguasa, mengingat kesadaran setiap orang tidaklah sama.

Dalam konteks partisipasi ini juga, oposisi adalah dampak dari kebebasan rakyat untuk melakukan respons dan kritik atas kebijakan pemerintah agar dapat lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Irish Young (2002, 76) mengatakan bahwa kajian Ian Shapiro dalam *Democratic Justice* menunjukkan pentingnya melihat demokrasi sebagai sesuatu yang terkait erat dengan dua persoalan penting, yakni partisipasi

dan anti-subordinasi. Terkait dengan partisipasi itu, Young mengatakan:

*“Everyone whose basic interests are affected by institutions or practices should be able to participate in their governance on more or less equal terms with others. Everyone ought to be able to assert their opposition to decisions that have been made, furthermore, and should be free to criticize and try to change policies and practices.”*

Pandangan Shapiro yang diwakili oleh Young di atas menunjukkan bahwa oposisi pada hakikatnya adalah konsekuensi dari adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan oposisi merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan demokrasi, mengingat pemerintahan demokratik ialah pemerintahan yang membuka keterlibatan khalayak yang luas.

Hal lain dalam demokrasi yang merupakan sokoguru bagi kehadiran oposisi adalah konsep pembagian kekuasaan (*division of power*). Pembagian kekuasaan merupakan salah satu inti pembeda antara pemerintahan demokratis dan pemerintahan yang antidemokrasi. Pada negara pemerintahan otoriter, misalnya, pembagian kekuasaan tidak pernah diakui, apalagi dilaksanakan. Pembagian kekuasaan dalam logika demokrasi menyiratkan pembenaran akan adanya perbedaan pandangan dan bahkan dalam batas tertentu konflik yang tetap berada dalam koridor konstitusi.

Dalam sudut pandang filosofis, pembagian kekuasaan terkait dengan penegakan kebebasan dan hakikat kemanusiaan. Bahwa kebebasan manusia, sebagai salah satu syarat terbentuknya tatanan yang berkemanusiaan, hanya akan menemukan bentuknya yang terbaik manakala kekuasaan tidak berada dalam genggam seorang penguasa. Sebaliknya, kekuasaan yang terenggam pada satu tangan dan tidak menyisakan peluang perbedaan pandangan, apalagi oposisi, hanya akan memunculkan kekuasaan yang tiranik atau despotik. Pemikir Barat, seperti Locke (1632–1704) dan Montesquieu (1689–1755), sejak sekitar empat abad yang lalu telah meyakini akan kebaikan adanya pembagian kekuasaan itu.

Dalam makna “pembongkaran” terhadap kekuasaan yang terenggam oleh satu tangan inilah, secara fundamental pula, oposisi menjadi

bagian tak terpisahkan di dalamnya. Hal ini terjadi karena merupakan hal yang mustahil jika membicarakan kekuasaan yang terbagi, tetapi pada hakikatnya pemangku kekuasaan hanya mewakili satu pandangan tanpa ada kekuatan yang mampu mengimbangi dan mengkritisnya. Dengan perannya sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pembagian kekuasaan, oposisi pada dasarnya turut memainkan peran penting dalam menciptakan tatanan politik yang lebih berkemampuan.

Selain persoalan pembagian kekuasaan, hal lain yang merupakan akar dari oposisi adalah konsep *checks and balances*. Konsep ini merupakan kelanjutan dari ide pembagian kekuasaan dan ditumbuhkembangkan pertama kali di Amerika Serikat. Inti dari konsep ini adalah cabang-cabang kekuasaan harus dapat saling mengontrol dan memberikan perimbangan. Diharapkan, dari adanya saling kontrol dan menyeimbangkan ini, tiap-tiap cabang kekuasaan tidak bekerja semata sesuai dengan kepentingannya.

Kontrol dan penyeimbangan itu memungkinkan pihak-pihak yang ada, baik dalam parlemen maupun eksekutif, dapat saling mengendalikannya dan mengingatkan jalannya pemerintahan agar tetap sejalan dengan kehendak masyarakat. Penyeimbang di dalam cabang ataupun di antara cabang inilah yang memungkinkan munculnya oposisi bagi pemerintahan yang tengah berkuasa. Menurut Amadigwe (2004), dalam skema pemerintahan parlementer sekalipun, para menteri harus tetap mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan parlemen, di mana kelompok oposisi biasanya akan melakukan kritik atas kebijakan yang diambil itu.

Akar-akar oposisi dalam konteks demokrasi itu berlaku universal. Artinya, dapat terjadi baik pada sistem parlementer maupun presidensial. Tidak ada pembatasan bahwa sistem pemerintahan tertentu lebih memberikan peluang atau membutuhkan oposisi dibanding dengan yang lain. Meski oposisi dalam konteks *checks and balances* seolah tampak nyata bentuknya dalam sistem parlementer, oposisi yang efektif juga terjadi dalam pemerintahan presidensial. Keberadaan oposisi di Amerika Serikat yang menganut sistem presidensial, misalnya, telah demikian kokoh.

Oposisi bahkan telah hadir tak lama setelah kemerdekaan, yang ditandai oleh munculnya Partai Demokrat-Republik (Democrat-Republic Party) sebagai partai oposisi. Dengan demikian, semangat mendasar demokrasi yang menopang terbentuknya oposisi dapat diterapkan dalam sistem mana pun, mengingat pada hakikatnya keberadaan oposisi terkait erat dengan keberadaan demokrasi itu sendiri.

## **b. Fungsi Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi**

Oposisi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam berbagai bidang. Oposisi dalam makna umum kerap diartikan sebagai “berseberangan” atau “sesuatu yang memiliki posisi yang tidak sama pada sesuatu yang lain”. Oposisi juga diartikan sebagai lawan atau perlawanan terhadap sesuatu (Rooney, 2001, 1020). Dalam konteks politik, sebagian kalangan mengartikan oposisi sebagai bentuk informal dari ketidakbersetujuan atau kontestasi di antara lembaga-lembaga pemangku kekuasaan, sementara oposisi politik adalah bentuk kontestasi yang terkait atau dijamin dalam konstitusi (Barnard, 1972, 1).

Tentu saja masih banyak definisi oposisi dan secara literal tidaklah sama. Namun, esensi yang selalu ada dalam makna oposisi adalah terkait dengan sekelompok orang yang berada di luar pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, ataupun kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis, kenyataan empiris, atau kepentingan tertentu.

Oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi menurut Dahl (1971) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi salah satu fondasi, selain partisipasi, dari yang disebutnya sebagai *polyarchy* (poliarki) atau sebetulnya pemerintahan yang bernuansakan demokrasi. Dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi, terdapat beberapa fungsi utama oposisi. Pertama, sebagai penyeimbang kekuasaan. Makna penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan di luar pemerintah yang memberikan alternatif pikiran atau sikap dan menyebabkan keseimbangan

agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Makna utama penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat.

Pemerintahan Fasisme di Jerman (1939–1945), misalnya, terbentuk setelah Partai Nazi memenangi pemilu dengan perolehan suara yang sebetulnya juga tidak mayoritas mutlak. Ketidadaan penyeimbang, dengan kata lain, akan berpotensi memunculkan sebuah Leviathan yang tidak terkontrol dan dapat melakukan apa pun yang dikehendaki tanpa hambatan yang berarti. Oleh sebab itu, mempertahankan oposisi sama dengan mempertahankan demokrasi, mengingat tujuannya adalah agar pemerintah dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan serta melakukan pelaksanaan tugas-tugas negara dan pemerintahan dengan lebih baik, yakni sejalan dengan aspirasi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Kedua, arti penting oposisi adalah menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. Oposisi akan memungkinkan munculnya lebih banyak pilihan kebijakan atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tidak ada satu pun pemerintahan yang tak luput dari kesalahan. Pemerintahan yang dipimpin oleh mereka yang terbaik sekalipun tetap membutuhkan dukungan tidak langsung dari kelompok oposisi untuk dapat lebih menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat. Kemandulan oposisi, dengan demikian, adalah keterbatasan opsi bagi tegaknya aspirasi rakyat yang, manakala berjalan dalam waktu lama, dapat memunculkan pembusukan pemerintah sebagaimana yang terjadi di Myanmar era junta militer ataupun Indonesia era Orde Baru. Dengan kata lain, oposisi dibutuhkan agar sebuah kebijakan yang lebih komprehensif dapat tercipta dan kesalahan dapat diminimalkan.

Ketiga, arti penting oposisi lainnya adalah sebagai stimulus persaingan yang sehat di antara para elite politik dan pemerintahan. Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten dan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya kebijakan-kebijakan lain yang lebih

masuk akal ketimbang kebijakan pemerintah. Adanya oposisi akan membuat pemerintah yang berkuasa “terjaga” dan menyadari ada pihak lain yang bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik dan pada gilirannya berpotensi “mengganggu” citra positif pemerintah di mata masyarakat. Oposisi, oleh karena itu, diperlukan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan citra baiknya di mata masyarakat. Dalam situasi ini, muncullah situasi kompetisi yang sehat antara pemerintah dan oposisi menuju perbaikan demi perbaikan.

Oleh karena itu, jelas bahwa penguatan oposisi terkait dengan upaya menegakkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan menghindari terjadinya oligarki. Oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah atau asal berbeda, melainkan sebuah eksistensi yang memberikan kritik dan tawaran alternatif kebijakan dan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Oposisi adalah “pemihakan rasional” sebagai konsekuensi dari pelembagaan kontrol atas kekuasaan (Kamil, 2002, 17–18). Oposisi yang sehat, sebagaimana yang diyakini Dahl lebih dari empat dekade lalu, singkatnya adalah bagian dan sekaligus cerminan keberadaan demokrasi yang kokoh. Pembahasan berikutnya akan menunjukkan aspek empiris dari oposisi dan demokrasi di Indonesia.

## **OPOSISI DALAM PERJALANAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA**

### **a. Era Pra-Reformasi (1945–1998)**

Di masa-masa awal kemerdekaan, oposisi terhadap pemerintah muncul terutama dari partai-partai beraliran nasionalis dan Islam, terutama Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Masyumi, dua partai besar yang mewakili dua aliran politik tersebut. Hal ini terjadi karena pada masa-masa itu pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh sosialis, seperti Perdana Menteri Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Beberapa kebijakan yang menjadi sumber perlawanan oposisi adalah sejumlah perjanjian dengan Belanda yang dirasa menguntungkan pihak penjajah. Namun, secara umum, oposisi yang terjadi lebih mencerminkan kompleksitas lantaran banyak menteri, baik pada masa pemerintahan Syahrir, Syarifuddin, maupun

Hatta yang juga berasal dari dua partai besar tersebut, bahkan para menteri dari Masyumi, dikenal sebagai pembela kebijakan pemerintah yang gigih.

Sejak 1951, peran pemerintah dan oposisi terutama dilakukan oleh dua partai besar, yakni PNI dan Masyumi. Manakala PNI membentuk pemerintahan, Masyumi akan menjadi motor oposisi di parlemen, dan begitu pula sebaliknya. Dasar ideologi yang tidak terjembatani di antara dua partai itu serta kesetiaan terhadap partai yang demikian tinggi adalah landasan pertikaian dan persaingan di antara keduanya. Selain itu, perbedaan sudut pandang dalam prioritas kebijakan—yang dengan cukup baik digambarkan oleh Herbert Feith, yakni antara *solidarity maker* (PNI, kalangan nasionalis, dan sebagian kelompok komunis) versus *administrator* (Masyumi, PSI, Parkindo, dan Partai Katolik)—juga menjadi pemicunya (Feith, 1968; Lucius, 2003).

Meski demikian, hubungan oposisi dengan pemerintah pada 1950-an sekali lagi cukup kompleks karena, dalam kabinet yang dipimpin oleh Sukiman, Wilopo, Ali, ataupun Burhanuddin, kedua partai tersebut menempatkan kader-kadernya dalam pemerintah meski berstatus oposisi dalam parlemen. Dengan kata lain, oposisi tidak menyebabkan partai tidak memiliki wakilnya dalam pemerintahan. Barulah pada era pemerintah Ali II dan seterusnya Masyumi sama sekali tidak mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan dan menjadi “murni oposisi”. Lebih dari itu, sebagai negara yang baru belajar berdemokrasi, oposisi tidak selamanya berhasil diperankan dengan baik. Semangat “asal beda dengan pemerintah”, misalnya, juga terlihat pada masa-masa ini. Penolakan PNI, sebagai pihak oposisi, atas ratifikasi Pembatalan Uni Indonesia-Belanda yang dilakukan oleh pemerintahan Burhanuddin Harahap (Masyumi), misalnya, adalah sebuah keanehan, mengingat draf ratifikasi yang disusun saat pemerintahan Ali Sastroamidjojo (PNI) itu tidak pernah dipermasalahkan oleh PNI sebelumnya (Saidi, 1993, 2).

Terlepas dari segenap kelemahan dan kekurangannya, laku oposisi dilaksanakan oleh para politikus saat itu yang pada umumnya memahami benar akan hakikat demokrasi. Meski secara umum budaya beroposisi masih dalam

tahap awal dan belum meluas, kesadaran bahwa sebuah pemerintahan harus memiliki partner kritis di luar pemerintahan bukanlah sesuatu yang asing untuk dipraktikkan. Sesuatu yang memperlihatkan adanya semacam akselerasi budaya politik oposisi dalam kehidupan politik bangsa saat itu.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966), oposisi tidak lagi eksis atau setidaknya bergerak secara amat terselubung. Tiga partai dengan kecenderungan bersikap kritis terhadap Presiden Soekarno, yakni Masyumi, PSI, dan Partai Musyawarah Rakyat (Murba), dibubarkan. Tidak itu saja, Soekarno juga mereduksi jumlah partai menjadi 10 saja<sup>8</sup>, yang secara umum dimandulkan perannya. Soekarno juga memastikan bahwa para pemimpin partai yang “dibiarkan hidup” itu adalah mereka yang mau diajak kerja sama. Soekarno sendiri membangun rezim otoriternya dengan nama “Demokrasi Terpimpin”.

Dalam upaya membangun rezim itu, Soekarno mengedepankan ide-ide antidemokrasi, seperti kuburkan partai-partai atau ide bahwa demokrasi tidak cocok dengan karakter bangsa. Soekarno meyakini bahwa demokrasi parlementer yang selama ini dipraktikkan tidak tepat bagi bangsa Indonesia. Lebih dari itu, Soekarno meyakini bahwa sistem demokrasi liberal tidak mampu menawarkan stabilitas politik yang dibutuhkan oleh bangsa. Dengan dukungan kalangan militer, situasi darurat militer pun diberlakukan. Siapa pun yang dianggap anti-Soekarno atau dinilai kontra-revolusi segera saja ditahan, termasuk mantan PM Sutan Syahrir. Dapat dikatakan pada masa inilah akar-akar oposisi dicabut paksa oleh negara.

Situasi pada Orde Baru (1966–1998) tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Pada awalnya, pemerintahan baru ini tampak akan memberikan harapan besar bagi tegaknya demokrasi. Tidak sedikit kalangan kritis, mahasiswa, cendekiawan, juga tokoh aktivis sosial prodemokrasi awalnya bersemangat mendukung

<sup>8</sup> Kesepuluh partai itu adalah: (1) Partai Nasional Indonesia, (2) Partai Nahdlatul Ulama, (3) Partai Komunis Indonesia, (4) Partai Syarikat Islam Indonesia, (5) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, (6) Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, (7) Partai Kristen Indonesia, (8) Partai Katolik, (9) Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, dan (10) Partai Indonesia.

kepemimpinan Soeharto (Budiman, 2001, 31–32). Namun, kenyataan kemudian memperlihatkan bahwa tidak lama setelah rezim Orde Baru berdiri, Soeharto melakukan pemberangusan sistematis terhadap kalangan oposisi atau mereka yang berpotensi menjadi oposisi. Hal itu dilakukan, baik kepada partai politik maupun kalangan non-parpol. Dalam konteks parpol, sama dengan Soekarno, rezim Orde Baru melakukan seleksi kepemimpinan parpol. Banyak pihak yang dipandang akan berpotensi berseberangan dengan rezim disingkirkan. Kasus ini terjadi pada partai seperti PNI, Parmusi, dan PSII. Tidak hanya itu, rezim juga menyetujui aksi kekerasan untuk menundukkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Pendudukan kantor PSII pada 1973 (Subekti, 2014) ataupun penyerbuan DPP PDI pada 1996 mencerminkan kondisi ini.

Tidak berhenti pada hal tersebut, rezim Orde Baru juga melakukan langkah-langkah seperti memasung ideologi, memotong hubungan partai politik dengan akar rumput melalui kebijakan “massa mengambang”, dan memanipulasi pemilu. Kegiatan penyelidikan kehidupan personal melalui penelitian khusus diberlakukan di seluruh lembaga negara dan pemerintahan, termasuk DPR. Oposisi dalam konteks nonpartai pun dibungkam. Mereka yang bersikap antipemerintah akan dituduh mengganggu jalannya pembangunan. Rezim juga melakukan tindakan pengekalan terhadap tokoh-tokoh yang tergabung dalam Petisi 50 hanya karena mereka mencoba mengingatkan Soeharto agar lebih konsisten berdemokrasi dan tidak menafsirkan Pancasila secara sepihak. Saat kekuasaan Soeharto semakin menggurita dan personal, mereka yang dianggap kritis terhadap Keluarga Cendana juga dihabisi kariernya. Hingga akhir kehidupannya, rezim ini identik dengan kesungguhan memasung para oposan dan tidak segan untuk “menghilangkannya”.

Demikianlah kedua rezim Orde Lama dan Orde Baru secara berkesadaran melakukan pemberangusan terhadap (potensi) oposisi. Pada masa ini, tentu saja oposisi tetap ada. Denyut nadinya lebih terasa justru di luar pemerintahan. Meski mampu bergerak, kalangan oposisi dari berbagai kelompok, baik yang cenderung mengandalkan ketokohan maupun jaringan kritis, sayangnya

tidak solid. Secara umum, oposisi tercerai-berai, terabaikan haknya, dan tentu saja tidak seimbang dengan penguasa (Kroef, 1977, 109–125; Uhlin, 1998, 89–173; Tanter & Young, 1993, 1–18). Secara umum, keberadaan dan pembangunan oposisi pada masa ini berada pada titik nadir, sejalan dengan pudarnya kehidupan demokrasi di Indonesia.

## **b. Era Reformasi**

Di era reformasi, demokrasi kembali ditegakkan. Kebebasan berpendapat menemukan lagi momentumnya. Berbagai penghargaan diterima oleh pemerintah Indonesia dalam kaitan dengan kualitas demokrasi yang sedang berlangsung. Masyarakat pun tidak lagi merasakan tekanan dari pemerintah, bahkan relatif bebas mengkritik pemerintah. Kebebasan mendirikan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk pers dan partai politik, demikian menguat. Situasi di Indonesia membuktikan bahwa demokrasi dengan sistem presidensial dan banyak partai tetap mampu menciptakan stabilitas politik.

Kehidupan demokrasi, tidak dapat dimungkiri, telah jauh lebih baik bahkan mendapatkan pujian dari banyak negara dan organisasi internasional, termasuk misalnya oleh International Association of Political Consultant (IAPC), sebuah lembaga prestisius yang kerap memberikan medali penghargaan untuk negara yang dipandang berhasil dalam pelaksanaan demokrasi. Namun, meskipun Indonesia diakui sebagai negara demokratis, bahkan yang terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, kehidupan oposisi belum hadir pada taraf yang menggembirakan. Legasi dari sistem politik masa lalu yang bercirikan lemahnya oposisi tampak masih terasa.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri (1999–2004), oposisi tidak terlalu bermakna, mengingat seluruh potensi kekuatan politik nasional terserap dalam pemerintahan. Pada masa pemerintahan Gus Dur, seluruh partai besar dan menengah (PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKP) mendapatkan posisi dalam kabinet yang dipimpinnya bersama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. DPR praktis berisi partai-partai yang mayoritas

memiliki jabatan dalam pemerintahan. Hanya baru saat Gus Dur mengganti beberapa menteri (yang notabene adalah tokoh-tokoh utama partai koalisi) dengan teman-teman dekatnya, tanpa melakukan konsultasi yang mendalam, partai-partai mulai melakukan perlawanan.

Beberapa soal lain dijadikan alasan untuk melawan, seperti penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei dan Bulog (yang tidak cukup terbukti secara hukum) serta yang paling krusial adalah saat Gus Dur membubarkan parlemen secara sepihak. Namun, perlawanan yang berujung pada *impeachment* itu secara kronologis dan substantif tidak dapat dilepaskan dari soal respons atas pergantian atau *reshuffle* dan bukan dalam spirit oposisi sebagaimana yang biasa terjadi pada negara-negara demokrasi yang mapan. Perlawanan, dengan kata lain, tidak akan terjadi jika Gus Dur tidak melakukan manuver kontroversialnya. Terbukti kemudian Megawati dapat menyelesaikan masa tugasnya dengan selamat sebagai pengganti Gus Dur karena tidak melakukan manuver yang merugikan partai-partai pendukungnya.

Pada situasi kontemporer, bergabungnya beberapa partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) ke dalam jajaran pemerintahan menjadi salah satu bukti situasi beroposisi yang secara substansi juga masih lemah. Partai-partai yang awalnya menyatakan diri beroposisi dengan pemerintah, bahkan menjadi pesaing koalisi pemerintah pada saat pemilihan presiden, dengan mudah berubah arah mendeklarasikan diri sebagai loyalis pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh PAN, PPP, dan Golkar. Partai-partai pembentuk KMP memang tidak menyatakan membubarkan diri, tetapi keberadaannya kini lebih sebagai ajang silaturahmi yang bernuansa nostalgia ketimbang sebuah kekuatan oposisi yang solid, konsisten, dan efektif. Terlihat, misalnya, pada saat KMP berkumpul kembali pada akhir Maret 2016, mereka tetap menegaskan sebagai kelompok yang setia mendukung pemerintah.

Uniknya, pada era pemerintahan SBY (2004–2014), meski dalam bentuk berbeda, secara substansi memperlihatkan gelagat yang sama. Pada masa itu, muncul pola “politik kartel”, yakni ketika oposisi tidak banyak

bermakna dan kelompok-kelompok yang berpotensi memainkan peran oposisi justru terserap dalam pemerintahan (Ambardi, 2009). Meski sebagian kalangan tidak melihat hal itu sebagai murni sebuah pemerintahan kartel (Mietzner, 2013), kenyataan menunjukkan bahwa oposisi tidak berjalan efektif dan potensinya cenderung terserap dalam pemerintahan, dan hal ini tidak terelakkan. Partai-partai cenderung berkerumun mendekati kepada SBY dan membangun sebuah pemerintahan yang jauh dari semangat *checks and balances*.

Meski saat ini ada sedikit peningkatan kualitas oposisi, terutama di awal pemerintahan Jokowi—dan kenyataan masih ada partai yang tegas menyatakan berada di luar pemerintahan, seperti Gerindra dan PKS—fenomena oposisi saat ini dalam perkembangannya cenderung memperlihatkan sebuah kelanjutan pola lama hubungan pemerintahan dengan oposisi. Fungsi oposisi, yang sebenarnya dapat diperankan oleh KMP secara maksimal, justru memperlihatkan fenomena oposisi yang bersifat terbatas dan tidak cukup efektif.

Kondisi semacam ini tampak mirip dan menunjukkan sebuah warisan masa lalu, terutama dari era Orde Baru (Bunte & Ufen, 2009, 9–12), yakni oposisi pada akhirnya cenderung tercerai-berai dan tampak kehilangan posisi. Namun, sementara dulu hal tersebut lebih dipengaruhi oleh tekanan rezim, pada saat ini perilaku elite partailah yang berperan dalam melemahkan kedudukan oposisi sebagai efek pilihan pragmatis mereka untuk selalu mendekat dan berada dalam lingkaran kekuasaan. Di samping itu, jika dibanding dengan demokrasi di negara-negara Barat atau kehidupan politik nasional era 1950-an, peran besar para elite atau oligarki juga menunjukkan lemahnya peran ideologi dalam kehidupan internal partai saat ini, yang kemudian berimbas pada perilaku politiknya.

Kondisi ini diperburuk oleh pemahaman dari banyak elite atau tokoh berpengaruh partai yang juga masih melihat oposisi sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan politik saat ini. Mereka menyatakan hal itu dengan berbagai alasan, seperti tidak sesuai dengan karakter bangsa, tidak dikenal dalam sistem presidensial,

atau tidak sejalan dengan idealisme partainya. Maimun Zubair, tokoh kharismatis PPP, misalnya, menafsirkan oposisi sebagai pihak yang hanya mencari kesalahan (Gatra, 2014, 23).

Selain itu, cukup jelas terlihat bahwa hingga kini oposisi yang terlembaga masih belum mendapat dukungan kuat dari kalangan masyarakat. Konsep oposisi tidak terlalu mengakar atau kurang mendapat dukungan masyarakat, terutama karena pemahaman oposisi yang tidak tepat. Dengan minimnya dukungan ini, oposisi di era reformasi tampak berada dalam posisi yang gamang dan justru terlihat terkucilkan dari opini yang berkembang di masyarakat tentang pemerintah, yang kerap dimanipulasi oleh pemerintah itu sendiri. Namun, tidak semua kalangan kemudian menarik diri dari posisi oposisi. Beberapa kalangan, seperti media massa, cerdik cendekiawan, aktivis LSM, dan beberapa kader partai, tetap menunjukkan sikap perlawanan terhadap pemerintahan. Meski demikian, hingga hampir dua dekade berjalannya reformasi, terutama di masa-masa pemerintahan SBY, peran oposisi lebih dimainkan oleh kalangan nonpartai dan ekstra-parlementer, yang sayangnya bersifat sporadis dan tidak benar-benar dapat dijadikan barometer kontrol terhadap pemerintahan yang efektif.

Dampaknya, alih-alih menjadi ranah bagi kehidupan demokrasi yang sehat, Indonesia saat ini justru terjebak dalam praktik oligarki yang masih menempatkan kepentingan sedikit orang di atas kepentingan rakyat banyak. Kebijakan pemerintah untuk rakyat kerap tersandera atau dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan (Sabri, 2012). Demokrasi yang cenderung artifisial, dengan demikian, adalah hasil yang dituai oleh situasi pemerintahan tanpa oposisi yang efektif itu.

## LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN OPOSISI

Pembahasan di atas mengisyaratkan belum kuatnya keberadaan oposisi di Indonesia. Untuk itu, membangun oposisi adalah sesuatu yang amat diperlukan. Bagian selanjutnya akan membahas upaya-upaya yang harus dikembangkan dan dilakukan dalam upaya membangun oposisi,

terutama dalam konteks politik. Langkah ini meliputi pembenahan di level masyarakat, yang terutama penting, mengingat peran strategis dukungan dan makna dari partisipasi politik itu sendiri. Lalu, perbaikan di level partai politik, yang terkait dengan perannya yang bersifat langsung dalam pemerintahan.

### a. Memperbaiki Persepsi, Membangun Kesadaran, dan Menguatkan Komitmen

Salah satu “cerita sukses” Orde Baru dan Orde Lama adalah mampu mempersepsikan bahwa menjadi oposisi adalah sebuah kesalahan. Oposisi dianggap pula sebagai mereka yang telah terpengaruh oleh pandangan politik liberal yang pro-individualisme, bahkan antek kekuasaan asing. Oposisi juga disamakan dengan mereka yang telah tercerabut dari akar dan jati diri bangsa. Citra oposisi sebagai sesuatu yang buruk ditumbuhkembangkan secara sistematis pada dua pemerintahan itu. Pada masa Orde Lama, oposisi dicitrakan sebagai kontra-revolusi dan sesuatu yang tidak natural atau kerap disampaikan dengan istilah “ditanam” oleh kekuatan asing (Pratigny, 1983, 24–32). Sementara oposisi di era Orde Baru distigmakan sebagai anti-Pancasila, anti-Pembangunan, atau kalangan ekstrem.

Selain pencitraan negatif, ada dua isu besar yang kerap diembuskan terkait dengan pengembangan praktik oposisi dalam alam demokrasi. Pertama, oposisi hanya akan menimbulkan ketidakstabilan karena pada akhirnya oposisi hanya akan menyebabkan pemerintah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, dengan kondisi itu, berarti oposisi hanya akan menyebabkan pembangunan melambat dan kesejahteraan bangsa tak tercapai.

Kedua isu tersebut tentu saja tidak memiliki dasar empiris yang memadai karena, misalnya, dari 14 negara paling stabil (*sustainable*) di dunia dewasa ini, 13 negara menggunakan sistem parlementer dan hanya satu negara, yakni Portugal, yang menggunakan sistem semi-presidensial<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Negara paling stabil (*sustainable*) ialah negara-negara yang berada pada posisi di atas negara-negara stabil. Urutan ke-14 negara paling stabil itu adalah (1) Swedia (20,2); (2) Norwegia (20,8); (3) Denmark (21,5); (4) Luxemburg (22,2); (5) Swiss (22,3); (6) Selandia Baru

Padahal, pada sistem parlementer, oposisi justru difasilitasi, terlembaga, dan lebih dari itu hampir sama kuatnya dengan pemerintah. Sementara dalam konteks penciptaan kesejahteraan, terlihat bahwa dari 15 negara paling sejahtera di muka bumi saat ini, hanya satu yang menggunakan sistem presidensial, yaitu Amerika Serikat, sedangkan sisanya menggunakan sistem parlementer (The Legatum Prosperity Index, 2015). Hal yang perlu dicatat adalah Amerika Serikat pun merupakan negara yang memiliki tradisi oposisi yang amat kuat<sup>10</sup>. Pandangan salah kaprah di atas sayangnya telah telanjur cukup tertanam di masyarakat, yang pada akhirnya membuat pemikiran yang mengaitkan oposisi dengan hal-hal negatif tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Selain masalah persepsi negatif, penghargaan terhadap oposisi dan berkomitmen atasnya terhalangi atau mendapat tantangan dengan kuatnya sikap pragmatisme dalam berpolitik. Pragmatisme ini menyebabkan komitmen beroposisi dapat dengan mudah mencair atau terbeli ketika berhadapan dengan tawaran-tawaran politik yang menggiurkan. Komitmen beroposisi menjadi sulit terbangun juga karena masyarakat pada umumnya belum cukup mampu mempertahankan kemandiriannya, terutama terkait dengan persoalan ekonomi. Dalam hal ini, mungkin saja masyarakat telah memiliki pandangan yang jauh lebih baik mengenai pentingnya beroposisi. Namun, ketidakberdayaan ekonomi membuat mereka tidak memiliki pilihan selain berdamai dengan penguasa atau setidaknya mengurangi sikap kritis. Lemahnya kemandirian menyebabkan upaya untuk beroposisi dapat mudah diredam oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas meredupnya semangat oposisi.

Hal lain yang juga menjadi persoalan dalam membangun konsistensi dalam beroposisi adalah masih adanya ketergantungan pada patron atau

---

(22,6); (7) Islandia (23,4); (8) Australia (24,3); (9) Irlandia (24,7); (10) Kanada (25,7); (11) Austria (26,0); (12) Belanda (26,8); (13) Jerman (28,1); dan (14) Portugal (28,7).

<sup>10</sup> Ke-15 negara itu adalah (1) Norwegia, (2) Swiss, (3) Denmark, (4) Selandia Baru, (5) Swedia, (6) Kanada, (7) Australia, (8) Belanda, (9) Finlandia, (10) Irlandia, (11) Amerika Serikat, (12) Islandia, (13) Luxemburg, (14) Jerman, dan (15) Inggris.

*political broker* di sebagian besar masyarakat. Dalam nuansa politik yang masih mengandalkan patronase politik, yang sayangnya kerap dikuasai oleh para elite birokrasi (birokrat) atau pemilik modal (saudagar), benih-benih beroposisi dikacaukan oleh berubah-ubahnya sikap dan orientasi patron terhadap penguasa. Peran kaum oligarkh ataupun elite sebagaimana yang telah disebutkan di awal tulisan ini telah demikian mewarnai kehidupan politik, baik langsung maupun tidak, di hampir semua level masyarakat.

Pada masyarakat perkotaan, dengan kemampuan ekonomi dan kemandirian politiknya, peran patron mungkin tidak seluas di masyarakat pedesaan. Namun, uniknya, masyarakat perkotaan juga tidak melihat keberadaan dan laku oposisi sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak. Meski masyarakat kota dapat lebih bebas memilih sesuai dengan rasionalitasnya, hal itu tidak berarti mereka kemudian akan bersedia dan berkomitmen mengawal pemerintahan berdasarkan pada rasionalitasnya itu setelah pelaksanaan pemilihan. Hal yang terjadi adalah jika tidak merasa puas terhadap rezim, masyarakat kota akan kembali disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan dasarnya dan melihat segenap bentuk kelemahan publik sebagai sesuatu yang “biasa terjadi” tanpa perlu menawarkan solusi, apalagi memperjuangkannya. Apa yang terjadi di kalangan perkotaan itu menunjukkan bagaimana *mindset* dan mentalitas oposisi yang telah ditumpulkan oleh rezim-rezim di sepanjang jalan sejarah bangsa menuai hasil.

Lepas dari itu, secara umum, dalam kondisi ekonomi yang masih belum mampu menopang terbentuknya kemandirian politik, ditambah pola politik pragmatis dan masih kuatnya kecenderungan ketergantungan pada patron, keberadaan oposisi jelas sulit berkiprah dengan baik. Dengan dua persoalan utama, yakni (1) persepsi yang tidak tepat atas oposisi dan (2) lemahnya kemandirian politik, pembenahan oposisi sesungguhnya patut diarahkan ke kedua persoalan tersebut. Berkaitan dengan persepsi, diperlukan perluasan pemahaman yang tepat melalui berbagai jaringan dan institusi. Pendidikan politik tentang pembangunan demokrasi dan peran krusial oposisi, yang terutama terkait dengan hak dan kewajiban warga negara untuk

berpartisipasi politik (termasuk melakukan kritik terhadap penguasa), patut menjadi agenda penting lembaga-lembaga formal ataupun nonformal itu. Dalam konteks ini pula lembaga seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga penyadaran politik, baik milik publik maupun swadaya masyarakat, menjadi penting adanya.

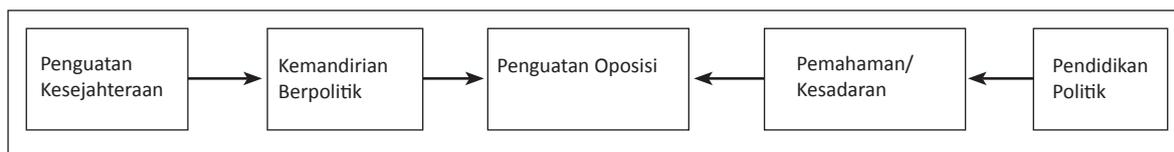
Selain itu, media massa dapat berperan di dalamnya dengan, misalnya, memberikan dukungan dan penghargaan terhadap kekuatan oposisi. Media massa juga harus memberikan ruang yang sama dan dorongan yang signifikan kepada kalangan kritis yang berseberangan dengan pemerintah. Harus diakui bahwa saat ini masih banyak media massa yang memihak, baik atas dasar kesamaan ideologis maupun kepentingan atau karena faktor lain yang bersifat simbiosis mutualisme atau bahkan kolusif. Apa pun penyebabnya, sejauh hal ini masih menggejala, maka upaya membesarkan dan membangun oposisi akan terus mengalami tantangan serius. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ada daya dorong bagi media massa, baik dari dalam (otokritik) maupun dari luar, untuk menyadarkan peran hakiki mereka sebagai pilar keempat dari demokrasi. Dalam posisi itu, media massa bukan diabdikan untuk sekadar “yang penting sama” atau “yang penting beda” dengan penguasa, melainkan dapat turut melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan dengan mengedepankan rasionalitas objektif dan komitmen memperjuangkan aspirasi atau kedaulatan rakyat secara maksimal.

Di samping itu, di tengah masyarakat sendiri, sudah saatnya makin ditumbuhkan gerakan kedewasaan politik untuk bersedia melakukan pembiasaan dan penghargaan terhadap perbedaan, toleransi, dan sikap bertanggung jawab atau perbedaan ataupun eksistensi kelompok-kelompok alternatif. Perbedaan politik bukanlah cerminan

sebuah ketidaksolidan, melainkan sebuah upaya makin menguatkan perbaikan dengan berbagai alternatif solusi. Adanya pemahaman yang tepat pula akan membuat masyarakat dengan sendirinya memberikan dukungan yang lebih ekspresif dan bermakna terhadap langkah atau kebijakan pemerintah ataupun elite politik yang dianggap merugikan kepentingannya.

Adapun ihwal penguatan kemandirian politik, hal ini pada akhirnya berhubungan erat dengan taraf hidup masyarakat. Sebuah masyarakat, jika ekonominya kuat, komitmen tidak akan mudah terbeli karena mereka dapat menetapkan dan mempertahankan pilihan politiknya secara mandiri. Sudah menjadi rumusan lama, terutama bagi para penganut pendekatan modernisme dan *developmentalisme*, bahwa penguatan ekonomi akan mengarah ke modernisasi politik, yang dalam hal ini salah satunya ditandai oleh partisipasi yang rasional dan mandiri dari warga negaranya.

Sehubungan dengan hal itu, peran berbagai pihak yang terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, termasuk pemerintah dan *stakeholders*, menjadi penting adanya. Pemerintah dan pihak-pihak terkait bertanggung jawab menumbuhkan dan menguatkan oposisi dengan membangun kemandirian masyarakat itu. Adanya langkah-langkah pemandirian masyarakat ini diharapkan membuat masyarakat di kemudian hari dapat lebih leluasa dan bertanggung jawab dalam mengekspresikan aspirasi dan aktivitas politiknya. Tegaknya kemandirian ini juga akan menopang upaya-upaya menguatkan praktik beroposisi yang berorientasi menciptakan pemerintahan yang dapat berjalan dengan lebih maksimal dan memberikan banyak keuntungan terhadap mereka sehingga dapat lebih berkembang di masyarakat (Liddle, 2014, 77).



**Gambar 1.** Skema Langkah Penguatan Oposisi di Level Masyarakat/Non-Partai

## b. Penguatan Kondisi Internal Parpol

Kesadaran untuk menguatkan kembali peran oposisi dalam tatanan masyarakat tidak akan banyak berarti jika dalam tatanan *political society*, dalam hal ini diwakili oleh partai politik, juga tidak tergarap dengan baik. Hal ini terjadi karena pada akhirnya parpol adalah institusi yang terkait langsung dengan pembentukan oposisi dalam pemerintahan. Sehubungan dengan parpol maka pembenahan laku beroposisi pada prinsipnya adalah penguatan (kondisi) parpol itu sendiri, yang melibatkan tiga persoalan utama, yakni (1) pemantapan ideologi, (2) pelaksanaan kaderisasi, dan (3) kemandirian partai.

Berkaitan dengan persoalan pertama, dapat dilihat bahwa hal yang memungkinkan oposisi tumbuh kuat, selain tingginya kesadaran berdemokrasi, adalah adanya keyakinan atas ideologi. Pada kasus negara-negara demokratis yang sudah solid, terlihat warna ideologis antara mereka yang memerintah dan yang mengambil peran oposisi tampak jelas berbeda. Perbedaan itu berlanjut hingga waktu yang lama tanpa kemudian terlihat keinginan melebur menjadi satu kelompok.

Peleburan atau koalisi cenderung terjadi pada partai-partai yang memiliki kedekatan ideologi dengan membentuk sebuah kaukus untuk menguatkan *bargaining position* terhadap pihak lawan. Pertarungan antara kelompok sosialis (kiri) dan *gaullist* (kanan) di Prancis, misalnya, selalu terjadi dan mewarnai konstelasi politik sejak republik kelima berdiri. Pola yang sama hampir mewarnai seluruh negara Barat. Tidak mengherankan bila kehidupan politik di negara-negara tersebut dipenuhi oleh sikap tiap-tiap kubu yang sering kali berbeda amat tajam. Dengan perbedaan ini, kedudukan politik sebuah partai tidak mudah bergeser, termasuk saat berperan menjadi oposisi. Di sinilah arti pembagian ideologi “kiri” dan “kanan” dengan segenap varian di dalamnya bermakna.

Hal ini mengindikasikan bahwa peran menjadi oposisi dapat terlaksana dengan baik manakala partai mampu membangun basis ideologi yang kokoh dan mempraktikkannya. Ideologi tidak semata bersifat simbolis, tetapi juga mampu menjadi sumber inspirasi yang menggerakkan para kader dan menjadi landasan

partai dalam mengambil kebijakan ataupun menentukan pilihan-pilihan politik. Sayangnya, pemantapan ideologi saat ini masih menjadi persoalan pada sebagian besar partai di Indonesia. Sejauh ini, kebanyakan partai masih digerakkan oleh kepentingan oligarkis dan elite tertentu.

Di tangan para elite itulah landasan kebijakan dan keberpihakan politik partai ditentukan. Sayangnya, elite partai tidak selamanya digerakkan oleh idealisme atau komitmen ideologi, tetapi oleh kepentingan eksklusif untuk selalu berada dalam lingkaran kekuasaan, baik pada level nasional maupun lokal. Dalam nuansa seperti ini, transaksi politik yang bersifat pragmatis kerap lebih dikedepankan. Akibatnya, komitmen beroposisi demikian cair atau kerap berantakan di tengah jalan. Di sisi lain, bagi partai-partai yang tengah memerintah, lemahnya keyakinan ideologi menyebabkan mereka tidak cukup percaya diri untuk dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan pada ideologinya. Akibatnya, alih-alih tetap mencoba konsisten dengan keyakinan politiknya, pemerintah justru sibuk untuk memamatkan potensi oposisi, terutama di masa-masa awal pemerintahannya.

Pada masa datang, partai-partai di Indonesia harus lebih bersungguh-sungguh membangun ideologi dan menempatkannya sebagai basis atau penjurur bagi tawaran-tawaran kebijakan ideal. Oleh sebab itu, harus diperjuangkan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Penegakan komitmen ideologis semacam ini dapat dimulai pada kesadaran untuk menemukan dan memantapkan kembali arah ideologi partai dan menyosialisasinya secara sistematis kepada seluruh kader melalui kepengurusan, jaringan partai, dan kursus-kursus ideologi partai. Setiap kepengurusan, misalnya, harus melakukan kursus atau *training* ideologi kepada seluruh kadernya di setiap tingkatan, dari yang paling rendah (level ranting) hingga pusat. Jenjang karier kader pun sedikit-banyak harus ditentukan oleh pemahaman dan komitmen mereka terhadap ideologi.

Selain penguatan peran ideologi, kaderisasi adalah hal lain yang harus dibangun secara sistematis. Melalui kaderisasi yang sistematis, para kader akan memahami jati diri partainya, termasuk tujuan partainya. Secara umum, ka-

derisasi berkaitan dengan pemantapan kesadaran bahwa hakikat keberadaan kader adalah sebagai fungsionaris atau “alat partai” yang dituntut untuk terus memberikan kebaikan kepada partai dan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai langkah dan kebijakan yang dirasa menjauhkan partai dari semangat ini akan ditinggalkan.

Melalui kaderisasi ini pula kader akan ditempa kesadaran kolektifnya, yakni sebagai bagian dari sebuah komunitas yang berkhidmat pada sebuah nilai-nilai (*values*) dan tujuan atau idealisme bersama. Dengan kuatnya pemahaman ini, kader tidak mudah digerakkan oleh kepentingan pragmatis yang bersifat sesaat ataupun yang bersifat pribadi.

Kaitan kaderisasi dengan oposisi adalah jelas bahwa, manakala pemerintahan yang terbentuk tidak mewakili kepentingan atau aspirasi ideologis partai, dengan sendirinya partai akan mengambil posisi di luar pemerintahan. Partai tidak akan mudah tergoda untuk bergabung ke dalam pemerintahan hanya demi kepentingan yang bersifat material atau pragmatis semata. Menempatkan diri sebagai bagian dari oposisi akan bersifat otomatis saja dan dilandasi oleh kesadaran penuh yang setara antara elite dan kader biasa. Di sisi lain, partai akan ditinggalkan apabila logika nonideologis ternyata menjadi alasan utama yang diambil dalam menentukan posisi politiknya di hadapan pemerintah.

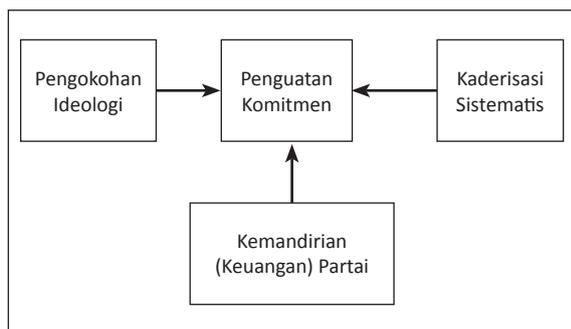
Untuk mendorong dan turut menguatkan pembangunan kaderisasi maka UU Partai Politik di masa datang harus pula didesain untuk dapat memastikan bahwa kaderisasi yang sistematis dan berkala dapat berjalan sebagaimana mestinya. UU Partai Politik harus dapat memaksa partai agar bersungguh-sungguh melaksanakan kaderisasi secara kontinum dan menjadikan kaderisasi sebagai mekanisme yang menentukan jenjang karier para kader. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dengan melakukan verifikasi pelaksanaan kaderisasi secara random dari kepengurusan partai yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagi partai-partai yang terbukti tidak mampu melakukannya, pemerintah berhak membatalkan keikutsertaannya dalam pemilu.

Hal ketiga yang juga harus dilakukan adalah membangun kemandirian paripurna partai-partai.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, yakni komitmen untuk berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi yang paripurna atau total membutuhkan kemandirian yang juga total. Apabila partai masih terikat pada pemerintah, baik karena kepentingan patron maupun kebutuhan yang memaksanya terikat, peran oposisi akan tidak banyak bermakna. Hal ini berarti partai harus dapat mengokohkan kemandiriannya dengan memiliki sumber-sumber kekuatan finansial sendiri. Menurut Mietzner (2014, 99–116), kegagalan dalam soal mendanai kehidupan partai secara benar inilah sumber utama munculnya praktik politik yang menyimpang dari demokrasi saat ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah negara memberikan dana yang memadai untuk dikelola oleh partai dengan prinsip dilakukan melalui transparansi yang tinggi dan pertanggungjawaban atau kontrol yang tanpa kompromi. Pelanggaran atau penyalahgunaan dana itu dapat dikenai sanksi yang amat berat, termasuk pembatalan keikutsertaan dalam pemilu. Rasionalitasnya adalah membiarkan partai mengumpulkan dana tanpa bantuan pemerintah akan menyebabkan partai, cepat atau lambat, dikuasai oleh pemberi sumbangan terbesar yang dapat menjadikan partai sebagai kendaraan politik dan pada akhirnya menguatkan oligarki internal. Kemandirian partai akhirnya bergantung atau terbeli pada kepentingan pemberi sumbangan terbesar itu. Manakala sang penyumbang menginginkan jabatan di pemerintahan, bisa saja akhirnya partai merapat ke pemerintah meski jati diri dan ideologinya tidak sejalan dengan pemerintah. Di sisi lain, apabila partai tidak memiliki donor yang besar, upaya-upaya partai untuk mendapatkan uang akan mengundang terjadinya pemanfaatan posisi jabatan negara atau publik yang kerap berujung pada korupsi demi kepentingan partai.

Adapun mereka yang murni berada di luar pemerintahan berpotensi mengalami kebangkrutan total karena tidak memiliki sumber pendanaan. Studi Perludem (Supriyanto & Wulandari, 2012) memperlihatkan bahwa dengan hanya mengandalkan iuran anggota dan usaha-usaha lain yang legal dan tidak mengikat cenderung tidak banyak membantu partai dalam membiayai kebutuhan



**Gambar 2.** Skema Langkah Pembangunan Komitmen Oposisi Partai Politik

sehari-hari ataupun pelaksanaan berbagai agenda dan program partai, termasuk pelaksanaan kaderisasi secara berkala. Akibatnya, partai dihadapkan pada dua pilihan yang tidak mengenakan: mati suri demi menjaga idealismenya atau menyerah pada kenyataan dan bergabung dengan pemerintah. Dengan demikian, aspek strategis dukungan keuangan partai oleh pemerintah, yang harus dilakukan secara transparan dan terkontrol, tidak hanya akan membantu partai dalam menjalankan fungsi-fungsi dan segenap kebutuhannya, tetapi lebih dari itu adalah membantu parpol dapat lebih mandiri dalam menjalankan idealismenya, termasuk ketika memilih menjadi oposisi.

## PENUTUP

Pembahasan di atas memperlihatkan keterkaitan yang erat antara demokrasi dan oposisi. Oposisi, sebagaimana yang dimaksudkan, bukanlah sekadar sikap asal berbeda atau melawan kebijakan pemerintah, melainkan kelompok di luar pemerintah yang mampu melakukan kontrol dengan tegas dan memberikan alternatif kebijakan yang bernas. Sayangnya, eksistensi oposisi di Indonesia masih belum cukup solid. Pada masa-masa awal kemerdekaan, oposisi telah terjerembap pada ekstremisme. Sementara pada masa sesudahnya, selama hampir empat dekade, oposisi mengalami pengucilan dengan, misalnya, dicap sebagai tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan dianggap sebagai salah satu biang penyebab ketidakstabilan. Tidak mengherankan jika oposisi menjadi mati suri. Di era reformasi, yang diharapkan dapat menumbuhkan demokrasi secara lebih *genuine*, kecenderungan untuk melihat oposisi sebelah mata sayangnya masih belum berubah secara signifikan. Bedanya, sementara pada masa

lalu oposisi memang secara tegas dikucilkan, saat ini oposisi dianggap sebagai bukan pilihan yang menguntungkan. Terbangunlah kemudian pemerintahan yang berkecenderungan kartel, ketika potensi oposisi terserap menjadi bagian pemerintahan dan, dengan posisinya itu, mencari keuntungan dari berbagai fasilitas negara.

Dalam sejarah politik modern Indonesia, para pendiri dan elite bangsa secara sadar menghargai bentuk pemerintahan demokrasi dengan berbagai prinsip dasarnya. Atas dasar itulah mereka dapat dengan cepat merespons perkembangan-perkembangan politik modern yang menawarkan format politik yang demokratis. Pendirian partai-partai, misalnya, direspons secara baik dengan berdirinya (atau didirikannya kembali) partai-partai guna menyambut kemungkinan pelaksanaan pemilu dan terbentuknya pemerintahan perwakilan. Penghargaan terhadap demokrasi itu juga tecermin dari kesediaan melakukan oposisi terhadap pemerintah, yang terbukti dengan munculnya kritik atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PM Sutan Syahrir hingga penghujung 1950-an.

Sikap beroposisi itu sendiri tidak serta-merta ada dan meluas. Berkembang pada awalnya di kalangan sekelompok elite, cerdas pandai, dan mereka yang memahami politik modern, yang tentu saja jumlahnya masih sedikit. Namun, lambat tetapi pasti, kesadaran itu meluas dan ditularkan kepada masyarakat seiring dengan semakin tingginya kesadaran politik anak bangsa. Kesadaran beroposisi itu menguat hingga pada titik yang bagi sebagian orang telah amat meresahkan. Pemerintah mendapat partner oposisi yang demikian kritis, dengan dukungan masyarakat. Mereka yang resah membaca perkembangan ini sebagai bentuk belum matangnya bangsa Indonesia dalam berpolitik. Namun, terlepas dari pandangan seperti ini, kesadaran beroposisi dari waktu ke waktu sebenarnya semakin membaik. Hanya, sayangnya, saat kesadaran itu mulai tumbuh, bangsa Indonesia masuk ke pusaran sistem politik yang tidak lagi menghendaki adanya oposisi. Dengan berbagai alasan yang diindoktrinasi secara sistematis dan represif oleh rezim, oposisi dicoba untuk dilenyapkan.

Waktu selama sekitar empat dekade (1959–1998) telah cukup menimbulkan kegamangan penyikapan rakyat dan bahkan elite atas oposisi. Dampaknya adalah kesadaran dan penguatan oposisi, setelah rezim-rezim otoriter berakhir, tidak serta-merta terjadi. Sebagian besar masyarakat masih melihat oposisi sebagai suatu pelengkap yang tidak perlu. Bahkan, seiring dengan persoalan lain, seperti menguatnya (kembali) peran kaum oligarkh dan pragmatisme politik yang meninggi, komitmen oposisi ini kembali mengalami guncangan. Sikap merasa nyaman dan perlu untuk terus berada dalam arus kekuasaan tetap masih lestari, bahkan belakangan semakin terlihat difasilitasi dengan kekuatan material yang besar dan menjanjikan, terutama dari kalangan oligarkh. Dalam nuansa itulah, perilaku politik partai-partai, termasuk dalam kasus kontemporer yang dialami oleh PAN, PPP, dan Golkar, serta sebagian besar masyarakat, akhirnya masih tidak dapat sepenuhnya sejalan dengan hakikat dan watak oposisi yang sesungguhnya. Singkatnya, pola-pola mendekat pada kekuasaan terus terjadi, sementara komitmen menjadi oposan yang *genuine* tidak pula menguat.

Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi melalui pembangunan oposisi, artikel ini mengarah pada upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti oposisi dan revitalisasi partai politik. Tujuannya adalah agar muncul kesadaran yang lebih tepat akan demokrasi dan oposisi di level masyarakat serta meningkatkan kapabilitas partai dalam menjalankan peran demokratiknya, termasuk kemampuan partai dalam beroposisi. Pembahasan di atas menyiratkan bahwa upaya-upaya yang dapat menguatkan peran oposisi baik dalam makna kesadaran dan tradisi ataupun struktural (lembaga-lembaga demokrasi dan aturan main) harus dilakukan agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat semakin membaik.

## PUSTAKA ACUAN

Amadigwe, V. (2004). *The Relationship between separation of powers, rule of law and parliamentary sovereignty in British Constitution*. Diakses pada 16 Maret 2016 dari <http://www.worldoruunion.org/ArticlesRelationship.htm>.

- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap politik kartel. Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Barnard, F. (1972). Between opposition and political opposition, the search of competitive politics in Czechoslovakia. *Canadian Journal of Political Science*, 5(4), 533–552.
- Budiman, A. (2001). Negara dan masyarakat madani. Dalam St. Sularto (Ed.), *Masyarakat warga dan pergulatan demokrasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Buehler, M. (2014). Elite competition and changing state-society relations: Shari'a policymaking in Indonesia". Dalam Michele Ford & Thomas B. Pepinsky (Eds.), *Beyond oligarchy. Wealth, power and contemporary Indonesian politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Bunte, M., & Ufen, A. (2009). The new order and its legacy: Reflections on democratization in Indonesia. Dalam Bunte, Marco, & Ufen Andres (Eds.), *Democratization on post-Suharto Indonesia*. London: Routledge.
- Dahl, R. (1966). *Political opposition in western democracies*. New Haven, CT, and London: Yale University Press.
- Dahl, R. (1971). *Poliarchy: participation and opposition*. New Haven, CT, and London: Yale University Press.
- Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The quality of democracy: An overview. *Journal of Democracy*, 15(2), 20–31.
- Feith, H. (1968). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Ford, M., & Pepinsky, T. B. (Eds.). (2014). *Beyond oligarchy. Wealth, power and contemporary Indonesian politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Fragile States Index. (2015). Diakses pada 15 Maret 2016 dari <http://fsi.fundforpeace.org/>.
- Gatra. (2014). "Ketua majelis syariah DPP PPP K.H Maimoen Zubair: Saya nda seneng oposisi", (3 September 2014). Hlm. 23.
- Gutmann, A., & Thomson, D. (2004). *Why Deliberative democracy?*. New Jersey: Princeton University Press.
- Held, D. (1960). *Models of democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- Kamil, S. (2002). *Islam dan demokrasi. Telaah konseptual dan historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Kroef, J. van der. (Nov-Des 1977). The Indonesian opposition. *Asian Affairs*, 5(2), 109–125.
- Liddle, R. (2014). Improving the quality of democracy in Indonesia: Toward a theory of action. Dalam Michele Ford & Thomas B. Pepinsky (Eds.), *Beyond oligarchy. Wealth, power and contemporary Indonesian politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Lucius, R. E. (2003). *A house divided: The decline and fall of Masyumi (1950–1956)* (Master thesis, Naval Postgraduate School, Monterey).
- Mayo, H. (1991). *An introduction to democratic theory*. Cambridge: Polity Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology. Political parties in post-authoritarian Indonesia*. Singapore: ASAA Southeast Asia Publication Series.
- Mietzner, M. (2014). Oligarchs, politicians, and activists: Contesting party politics in Post-Soeharto Indonesia. Dalam Michele Ford & Thomas B. Pepinsky (Eds.), *Beyond oligarchy. Wealth, power and contemporary Indonesian politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- O'Donnell, G. (1996). Delegative democracy. Dalam Larry Diamond & M. F. Plattner, *The global resurgence of democracy*. Baltimore and London: John Hopkins University Press.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pratigny, I. (1983). *Ungkapan sejarah lahirnya Golongan Karya: Perjuangan menegakkan kembali negara proklamasi 17-8-1945*. Jakarta: Yayasan Bhakti TP.
- Przeworski, A. (1991). *Democracy and the market: Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roberts, K. M. (1999). *Deepening democracy: The modern left and social movements in Chile and Peru*. Stanford: Stanford University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London: Routledge Curzon.
- Rodan, G., & Jayasurya, K. (2009). Capitalist development, regime transitions, and new forms of authoritarianism in Asia. *The Pacific Review*, 22(1), 23–47.
- Rooney, K. (2001). *Encarta concise english dictionary*. Sydney: Pan Macmillan.
- Sabri, M. (2012). *Presiden tersandera, melihat dampak kombinasi sistem presidensial-multipartai terhadap relasi presiden-DPR di masa pemerintahan SBY-Boediono*. Jakarta: RMBooks.
- Saidi, R. (1993). *Golkar pascapemilu 1992*. Jakarta: Grasindo.
- Schumpeter, J. (1975). *Capitalism, socialism and democracy*. New York: Harper and Row.
- Shapiro, I. (1996). The fallacies concerning minorities, majorities, and democracy politics. Dalam Ian Shapiro, *Democracy's place*. Ithaca, NY, and London: Cornell University Press.
- Subekti, V. S. (2014). *Partai Syarikat Islam Indonesia. Kontestasi politik hingga konflik kekuasaan elite*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2012). *Bantuan keuangan partai politik*. Jakarta: Yayasan Perledem.
- Tanter, R. & Young, K. (1993). *Politik kelas menengah*. Jakarta: LP3ES.
- The Legatum Prosperity Index 2015. Diakses pada 15 Maret 2016 dari [www.prosperity.com/#/](http://www.prosperity.com/#/).
- Tornquist, O. (2006). Assessing democracy from below: A framework and Indonesian pilot project. *Democratization*, 13(2), 227–255.
- Uhlin, A. (1998). *Oposisi berserak, arus deras demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Winters, J. A. (2014). Oligarchy and democracy in Indonesia. Dalam Michele Ford & Thomas B. Pepinsky (Eds.), *Beyond oligarchy. Wealth, power, and contemporary Indonesian politics*. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Winters, J. A. (2004). *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press.
- Young, I. M. (2002). Ian Shapiro's democratic justice. *Good Society*, 11(2), 76–77.